



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

PASUNDAN

EKSPRES

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

Ingin Pertahankan

Lumbung Padi

Komitmen Kuat Pemkab terhadap Identitas Daerah

KARAWANG-Perkembangan Kabupaten Karawang, khususnya di dunia industri, tidak menghalangi pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan predikat sebagai daerah lumbung pangan Indonesia.

Dua potensi tersebut hingga HUT Karawang ke-385

kali ini, tetap bisa saling mengisi satu sama lain.

Hal itu tercipta berkat adanya k o m i t m e n

kuat dari pengelola pemerintahan agar Karawang tidak kehilangan identitas, khususnya predikat sebagai daerah lumbung pangan nasional.

"Di tengah desakan sektor industri, ada 97 ribu hektare lahan pertanian teknis yang harus kami pertahankan keberadaannya. Itu bukan pekerjaan gampang ■



Ke hal... 7



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

Ingin Pertahankan...

Dari halaman 1

Butuh komitmen dan kerja sama yang kuat dari berbagai elemen masyarakat," ujar Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana.

Menurutnya, pertumbuhan industri tidak bisa dihindari. Tetapi lahan pertanian pun tidak boleh punah. Apa artinya teknologi, jika masyarakat kekurangan pangan. Filosofi itu yang membuat Cellica bertekad untuk menjaga lahan pertanian yang masih tersisa.

Dikatakan Cellica, Kabupaten Karawang saat ini sudah memiliki Peraturan Daerah tentang LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Di dalam Perda tersebut disebutkan ada 87 ribu hektare sawah yang tidak boleh berubah fungsi untuk keperluan apapun. Sisanya ditoleransi dapat berubah untuk kepentingan pemukiman penduduk.

Menurut Cellica, kebutuhan pemukiman adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar. Lambat laun, masyarakat akan memakai lahan pertanian untuk dijadikan rumah. Namun, angka penggunaan lahan pertanian tersebut akan ditekan sekecil mungkin melalui berbagai kebijakan.

"Pengembang perumahan jelas dilarang menggunakan lahan pertanian untuk dijadikan properti. Bahkan, pada titik-titik tertentu mereka wajib

membangun pemukiman vertikal guna meminimalisasi penggunaan lahan," jelas Cellica.

Melalui berbagai kebijakan itu, lanjut Cellica, dirinya yakin Perda LP2B bisa dilaksanakan secara optimal. Lebih dari itu, julukan Karawang sebagai daerah lumbung pangan bakal terpertahankan.

Menurut Cellica, dari puluhan ribu hektare lahan pertanian yang masih ada, produktivitas padi dari Karawang saat ini mencapai 1,3 juta ton gabah kering panen (GKP) per tahun. Hasil panen sebanyak itu berkontribusi bagi kebutuhan pangan di Jawa Barat sebanyak 10 % dan kebutuhan pangan nasional 17,4 %.

"Hingga saat ini kontribusi pangan dari Karawang bagi kebutuhan nasional masih sangat potensial. Kalau lahan pertanian itu musnah, dari mana dapat penggantinya," kata Cellica.

Ia menambahkan, hingga sekarang lahan pertanian itu masih bisa terjaga. Desakan industri yang begitu kuat tidak sampai mengganggu lahan pertanian. Kunci dari semua itu adalah penataan ruang wilayah yang dilakukan Pemkab Karawang cukup rapi.

"Kami menyiapkan ruang untuk kawasan industri di Karawang Selatan dan sebagian di wilayah Cikampek.

Lokasi untuk kawasan industri itu sebelumnya merupakan lahan marginal. Sementara lahan pertanian teknis sejak dahulu berada di wilayah Karawang Utara," beber Cellica.

Sekarang yang memisahkan daerah industri dengan areal pertanian adalah jalan tol Jakarta-Cikampek. Di sebelah selatan tol itu, terdapat sejumlah kawasan industri berskala besar seperti Karawang International Industrial City (KIIC), Kawasan Industri Mitra (KIM), dan Kawasan Industri Surya Cipta. Sementara di wilayah Cikampek ada Kawasan Industri Kujang Cikampek (KIKC), dan Kawasan Industri Indo Taisai.

Di dalam lima kawasan industri tersebut terdapat ribuan pabrik yang bergerak diberbagai sektor. "Dengan pembagian pola ruang seperti itu, kehadiran industri yang begitu pesat tidak begitu mengganggu lahan pertanian," kata Cellica menegaskan.

Apalagi, lanjutnya, saat ini Pemkab Karawang melarang industri dibangun di dekat kawasan pemukiman, kendati lokasinya merupakan zona industri. Semua pabrik kini digiring masuk ke kawasan industri. "Dengan cara itu, dua predikat untuk Kabupaten Karawang yang sebenarnya saling berseberangan tetap bisa dipertahankan," pungkasnya. (use/din)



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

Karawang Mendapat Kuota 381 CPNS

KARAWANG-Pemkab Karawang mendapat kuota 381 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS), baik umum maupun khusus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Formasi tersebut terdiri dari formasi khusus untuk eks K2 88 formasi (bidang pendidikan). Sementara untuk formasi umum yakni tenaga guru 165, tenaga kesehatan 80 for-

masi, dan tenaga teknis 48 formasi," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang Aang Rahmatullah, Kamis (13/9).

Hanya saja, kata Aang, ada sedikit permasalahan berkaitan K2. Sebab, berfasarkan hasil verifikasi, di Karawang tercapat 40 K2 yang memenuhi syarat, sementara PANRB memberikan 88 formasi ■

Ke hal... 7

Karawang Mendapat...

Dari halaman 1

"Kemarin ibu kanreg gak bisa memutuskan, karena itu kewenangan menpan. Makanya besok mau kordinasi ke sana," tambah Aang.

Aang menyebutkan, pendaftaran dimulai 19 September 2018 secara daring melalui situs sccn.bkd.go.id. "Tidak ada pendaftaran melalui portal mandiri oleh Instansi," jelasnya.

Aang menyebut, calon pelamar hanya diperbolehkan mendaftar pada satu instansi pemerintah dan satu formasi jabatan.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Pelaksanaan seleksi akan dibuka pada minggu ketiga Oktober 2018.

Ada tiga tahap seleksi yang harus dilalui pelamar, yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan seleksi kompetensi bidang (SKB).

Pelaksanaan SKD CPNS tahun 2018 ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta SKD harus melampaui nilai ambang batas (passing grade) seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018.

Pengumuman kelulusan akan dilakukan pada minggu keempat November 2018.

Pelamar yang sudah dinyatakan lolos seleksi masih harus melalui tahap pemberkasan yang akan dimulai pada bulan Desember 2018.

Sementara, mekanisme/sistem pendaftaran untuk tenaga honorer Kategori II dilakukan tersendiri di bawah koordinasi BKN. Pendaftar dari tenaga honorer kategori II yang telah diverifikasi dokumennya wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Pelamar diminta untuk selalu memantau informasi terbaru mengenai rekrutmen CPNS ini melalui situs Kementerian PANRB yakni menpan.go.id dan situs Badan Kepegawaian Nasional, yakni sccn.bkn.go.id. (**aef/man**)